

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi Provinsi Kalimantan Utara pada Triwulan III Tahun 2025 secara bulan ke bulan/*month to month* (m-to-m), pada bulan Juli dan Agustus Provinsi Kalimantan Utara tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59 persen dan 0,11 persen. Sementara itu, pada bulan September 2025 Kaltara tercatat mengalami deflasi (mtm) sebesar -0,01 persen. Secara tahun ke tahun/*year on year* (y-on-y), Inflasi Kalimantan Utara Triwulan III Tahun 2025 (Juli hingga September) secara berturut-turut pada bulan Juli tercatat sebesar 1,59 persen, Agustus 2,44 persen, dan September 2,32 persen.

Inflasi Tahun Kalender/*Year to date* (y-to-d) Provinsi Kaltara pada Triwulan III Tahun 2025 tercatat sebesar 1,91 persen. Angka Inflasi tersebut tercatat berada pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 yaitu sebesar 2.5 ± 1 persen atau pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen.

10 Komoditas yang paling dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada September 2025, antara lain: emas perhiasan, tarif air minum pam, ikan bandeng, bawang merah, tarif rumah sakit, tomat, beras, nasi dengan lauk, kopi bubuk, dan minyak goreng. Sedangkan 10 komoditas yang paling dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: angkutan udara, cabai rawit, tahu mentah, labu parang, tempe, batu bata, bensin, semen, pengharum cucian, dan sabun cair cuci piring.

Sementara itu, komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada September 2025, antara lain: emas perhiasan, daging ayam ras, air kemasan, sawi hijau, bayam, telur ayam ras, bubur, ikan bandeng, kangkung, dan pasir. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m*, antara lain: ikan layang, bawang merah, angkutan udara, tomat, cabai rawit, ikan kembung, cabai merah, gula pasir, jagung manis, dan buncis.

Beberapa risiko kenaikan Inflasi Kalimantan Utara yang perlu diwaspadai pada Triwulan IV Tahun 2025 antara lain adanya potensi gangguan cuaca yang dapat mengganggu kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan serta meningkatnya permintaan pada momen Natal dan Tahun Baru.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Secara historis dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Inflasi Kalimantan Utara terbagi menjadi dua siklus. Siklus peningkatan inflasi biasanya terjadi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru) yang disebabkan karena meningkatnya permintaan. Sementara siklus deflasi terjadi akibat melimpahnya pasokan barang di pasaran dan adanya kebijakan pemerintah menurunkan harga komoditas *administered price* seperti Tiket pesawat dan tarif listrik.

Berdasarkan karakteristiknya, Inflasi kelompok *Administered Price* (AP) selalu berada di atas Indeks Harga Konsumen (IHK). Inflasi kelompok *Administered Prices* fluktuatif tergantung

siklus dan *shock* kebijakan Pemerintah Pusat. Inflasi kelompok *Core* relatif stabil. Sementara, inflasi *Volatile Food* (VF) cukup terjaga di level rendah dan relatif stabil.

Berdasarkan identifikasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan pengendalian inflasi Provinsi Kaltara yang perlu menjadi perhatian. Dari sisi keterjangkauan harga terdapat permasalahan pada adanya tingginya disparitas harga komoditas di Kaltara dibandingkan dengan harga komoditas Provinsi lainnya di Indonesia dan banyaknya harga komoditas di pasar yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP).

Dari sisi ketersediaan pasokan rendahnya produksi komoditas lokal masih menjadi penyebab utama tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah dan belum adanya Gudang Bulog yang melayani wilayah Kabupaten Tana Tidung dan Malinau yang menyebabkan tingginya biaya distribusi dan kecukupan pasokan untuk kedua wilayah tersebut.

Dari sisi kelancaran distribusi, keterbatasan infrastruktur masih menjadi permasalahan utama yang menghambat kelancaran pasokan utamanya pada wilayah perbatasan. Selain itu mahalnya biaya bongkar muat barang dan buruh angkut serta merusakkan jalan akibat faktor cuaca menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran distribusi komoditas di Kaltara.

Dari sisi komunikasi yang efektif terdapat permasalahan belum sinergi dan efisiennya anggaran pengendalian inflasi daerah serta adanya potensi ekspektasi inflasi meningkatnya permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah dilaksanakan melalui implementasi strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, ketersediaan Pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif). Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga telah dilaksanakan beberapa upaya antara lain: Melaksanakan sidak pasar pada tanggal 17 Juli 2025 di Pasar induk Tanjung Selor. Setiap hari kerja telah dilaksanakan verifikasi data bahan pokok pada aplikasi Sistem pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional, dan Sistem Informasi Pengendalian Inflasi dan Harga Terpadu Kalimantan Utara (Siap SIGAPKU). Pelaksanaan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada 2 Agustus 2025 di Tanjung Selor, 7 dan 29 September 2025 di Tarakan. Serta pelaksanaan pasar murah pada 25 Agustus 2025 dan 2 September di lapangan Agathis, Kabupaten Bulungan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan telah dilakukan beberapa upaya antara lain: 9 April 2025 melaksanakan Kampanye Gerakan AKU HATINYA PKK Ayo Tanam Cabe di Pekarangan. Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi telah dilakukan beberapa upaya antara lain: mendorong rute penerbangan baru dari dan ke Kalimantan Utara serta melaksanakan patroli pengawasan jalan.

Dalam rangka komunikasi yang efektif telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain telah dilaksanakan Rapat Rutin Mingguan Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri setiap hari senin. Pada tanggal 2 September 2025 telah melaksanakan rapat pengendalian harga beras.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka memastikan kebijakan pengendalian inflasi daerah yang tepat sasaran perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sebagai bahan perbaikan lebih lanjut. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi daerah Provinsi Kalimantan Utara Triwulan III tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut.

1. Kerja sama antar daerah dalam rangka pengendalian inflasi belum dilaksanakan secara optimal masih sebatas Kesepakatan Bersama dan belum ditindaklanjuti dengan upaya nyata.
2. Operasi pasar dan GPM belum dilaksanakan secara maksimal dan belum signifikan mengendalikan harga.
3. Monitoring harga harian sudah dilaksanakan oleh Disperindagkop melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Panel harga Pangan serta Bank Indonesia melalui PusatInformasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dengan baik. Data pemantauan hargatersebut perlu dikolaborasikan dan dilakukan analisis lebih lanjut agar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi lebih tepat sasaran.
4. Pelaksanaan sidak telah dilaksanakan dengan baik namun perlu lebih diintensifkan ke 5 Kabupaten/Kota di Kaltara untuk mengetahui pola distribusi dan rantai pasok sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
5. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sudah dilakukan, tetapi belum signifikan meningkatkan pasokan komoditas pangan daerah sehingga pasokan masih sangat bergantung pada daerah lain. vi) Peningkatan Cadangan Pangan pemerintah Daerah telah dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan bekerja sama dengan Perum BULOG utamanya terhadap komoditas beras. Perlu juga didorong cadangan pangan selain beras untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah.
6. Belum adanya Gudang Perum Bulog di wilayah KTT dan Malinau menyebabkan tingginya harga komoditas di kedua wilayah tersebut sehingga perlu didorong adanya diskusi lebih lanjut antara Provinsi kaltara, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Malinau dan Perum BULOG Kantor Cabang Bulungan untuk merealisasikan dibangunnya gudang untuk mengefisienkan distribusi pasokan. viii) Perlu adanya dorongan terhadap PT Pelindo (Persero) agar segera merealisasikan pengerukan dan pembangunan dermaga pelabuhan Malundung. Selain itu, perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan pelabuhan yang dikelola oleh Provinsi untuk perbaikan jalur distribusi barang.
7. Belum dilakukan pengaturan tarif bongkar muat, sehingga perlu dilakukan kajian penurunan tarif bongkar muat barang dan biaya bongkar muat barang sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
8. Telah dilaksanakan perbaikan jalan pada titik-titik yang rawan longsor oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara dan Besar Balai Jalan Nasional Kalimantan Timur. Selain itu, perlu adanya peningkatan dan perbaikan jalan utamanya pada jalan yang menjadi kewenangan provinsi.
9. Telah dilaksanakan koordinasi secara rutin melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Mingguan TPID se-Indonesia, dan Rapat Teknis TPID Provinsi Kalimantan Utara.
10. Sudah dilaksanakan sosialisasi belanja bijak oleh instansi terkait, tetapi ke depan perlu dilakukan sosialisasi secara masif melalui media informasi yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam rangka perbaikan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi Provinsi Kalimantan Utara dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut.

Berkaitan dengan Keterjangkauan harga perlu dilakukan kerja sama antar daerah, operasi pasar, Gerakan Pangan Murah yang berfokus pada komoditas yang sedang mengalami lonjakan kenaikan harga di atas HET/HAP, Penguatan monitoring harga harian komoditas pangan strategis, pemberian subsidi pada komoditas yang sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penguatan pengawasan agar subsidi tepat sasaran bagi masyarakat, serta mendorong peran BUMN dan BUMD dalam stabilisasi harga.

Berkaitan dengan Ketersediaan Pasokan perlu dilakukan peningkatan produksi beras lokal melalui cetak sawah dan peningkatan areal tanam, pendataan sawah yang belum ada irigasi/irigasinya rusak dan meningkatkan pompanisasi, peningkatan luas lahan pengembangan tanaman cabai di masing-masing kabupaten, serta penguatan informasi cuaca untuk peningkatan produksi pertanian.

Berkaitan Kelancaran Distribusi perlu dilakukan inspeksi pasar, distributor, agen, dan pengecer serta memberikan imbauan kepada distributor agar tidak menahan pasokan/penimbunan, Melaksanakan tindaklanjut Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah penghasil untuk mengisi persediaan selama masa tanam atau keterlambatan distribusi. Melaksanakan koordinasi bersama Kabupaten Tana Tidung dan Malinau dalam rangka membahas penyediaan lahan untuk pembangunan gudang Perum BULOG di salah satu wilayah tersebut. Selain itu, juga perlu adanya advokasi untuk mendorong dilaksanakannya pengerukan dermaga Pelabuhan Malundung, pembangunan dermaga Pelabuhan Malundung, pembangunan pelabuhan di Kabupaten Tana Tidung, dan pembangunan Pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, serta Perlunya dilakukan kajian penurunan tarif bongkar muat dan upah buruh pelabuhan. Mendorong perbaikan dan pembangunan jalan pada titik-titik yang rawan longsor. Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Berkaitan dengan komunikasi yang efektif perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan kolaborasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan komunikasi yang efektif untuk mengendalikan ekspektasi masyarakat dan mencegah *panic buying*.